



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

RENSTRA

TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk menata manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat memberikan pelayanan kepada publik secara profesional, dengan demikian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan di bidang kepegawaian.

Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan BKPSDM lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami Revisi RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembangunan jangka panjang dan sekaligus acuan rencana kerja tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga dokumen RENSTRA ini dapat menjadi landasan dan dasar dalam proses perencanaan dan implementasi manajemen kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 20 Januari 2023

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan**



Tamsir, S.H., M.M

NIP. 19670312 198803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa rencana mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai analisis antisipatif dan mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana strategis OPD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

Untuk itu penyusunan Renstra BKPSDM sekurang-kurangnya memperhatikan/mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKPSDM.

Proses penyusunan Renstra BKPSDM diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BKPSDM yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra BKPSDM, orientasi mengenai Renstra BKPSDM, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKPSDM dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BKPSDM, penyusunan rancangan akhir Renstra BKPSDM dan penetapan Renstra BKPSDM.

Selanjutnya dengan telah dirumuskannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan visinya adalah ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”***, dan salah satu misi yang diembannya adalah ***“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan ”***. Dari misi tersebut memiliki sasaran yaitu terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja, serta meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diatas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan menyusun dan menetapkan Rencana Stratejik yang akan menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi pemerintah, masyarakat dan stakeholders, maksud disusunnya Rancangan Rencana Strategis perubahan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021 – 2026 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

2. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan modern;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021 – 2026 adalah terjabarnya visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 (lima) Tahun ke depan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2021- 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II: GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM

2.2 Sumber Daya BKPSDM

2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BKPSDM

**BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BKPSDM.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara.

3.4 Telaahan Rencana Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV :TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah
BKPSDM

BAB V : STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam
lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan harapan serta masukan dari pembuatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

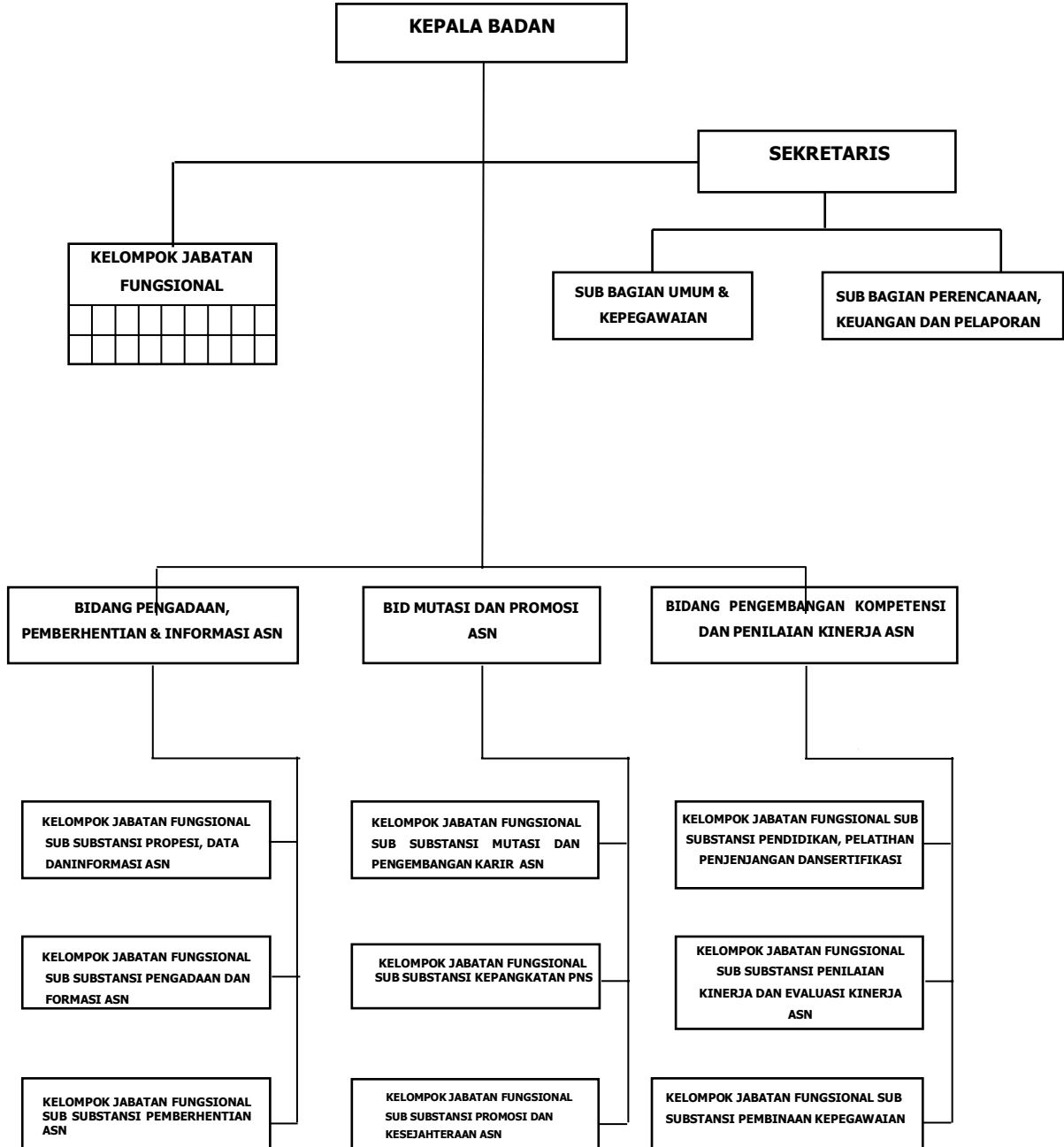
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



- I. Kepala Badan;
 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara,
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Pengadaan dan Formasi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Profesi, Data, dan Informasi Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
 3. Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub – Substansi Kepangkatan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Mutasi dan Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Promosi dan Kesejahteraan
 4. Bidang Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Pendidikan, Pelatihan, Teknis Jabatan Fungsional, Perjenjangan dan Sertifikasi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Pembinaan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.
 5. Unit Pelaksana Teknis : Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Analisis Kepegawaian).

Dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi diatas maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Pembina Kepegawaian di daerah mempunyai kewenangan dalam :

- a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah kepada seluruh Organsasi Perangkat Daerah.
- b. Penyiapan konsep, perumusan, penetapan formasi, pengadaan CPNS, tenaga honorer dan pengolahan data pegawai.
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Daerah dalam urusan mutasi, pangkat dan pensiun.
- d. Penyelenggaraan manajemen pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai.
- e. Penyusunan kebijakan, pengendalian dan pembinaan PNSD, sosialisasi peraturan kepegawaian, peningkatan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Uraian tugas Kepala Badan :

1. Merumuskan program dan kegiatan baik rutin maupun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi badan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah guna pedoman operasional kerja perangkat daerah;

3. Menetapkan sasaran pelaksanaan kegiatan badan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
4. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kepada sekretaris dan para kepala bidang di lingkup badan;
5. Menetapkan dan melaksanakan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Mengkoordinasikan sekretaris, para kepala bidang dan bawahan secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
8. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;
9. Membina, memfasilitasi dan mengarahkan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan;
10. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
11. Mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
12. Meneliti, memaraf dan/atau menandatangani persuratan dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
13. Memberikan data dan informasi mengenai situasi kepegawaian serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;

14. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Menjalinkan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
16. Mengendalikan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan badan, mengatur, membina, mengendalikan badan untuk mencapai sasaran;
17. Memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
18. Menghadiri rapat koordinasi dan rapat lainnya;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran dilingkungan BKSDM;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang Urusan Kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Perumusan rencana kerja dan rencana strategis;
- 5) Pengendalian administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan dilingkungan badan;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan administrasi teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di dalam organisasi;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan pendidikan dan pelatihan berdasarkan azas keseimbangan;

- 8) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan; dan
- 9) Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyiapkan konsep perumusan rencana, mengkoordinasikan, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan menganalisis pelaksanaan kegiatan di Sekretariat meliputi urusan umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan bidang dalam lingkup Badan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku.

(2) Uraian tugas Sekretaris :

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program badan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
3. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan badan;
4. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan badan;
5. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
6. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
7. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup badan;
8. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
9. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;

10. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
11. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
12. Menyiapkan draf rancangan peraturan daerah di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
13. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian dan kepala sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
14. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
15. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sekretariat dengan mempedomani data dan peraturan yang berlaku agar diperoleh konsep naskah yang benar;
16. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sekretaris dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
17. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sekretaris agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
18. Meneliti dan mengoreksi pekerjaan staf;
19. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut bidang sekretariat;
20. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
21. Menyimpan dan memelihara dokumen menurut ketentuan;
22. Menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan badan secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1) Bidang pengadaan, pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
 - c. Penyelenggaraan pengadaan dan formasi Aparatur Sipil Negara;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan informasi kepegawaian dan lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
 - f. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi Aparatur Sipil Negara;
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara mempunyai uraian tugas :
 1. Menyusun rencana kegiatan program kerja Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara;
6. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan kepada masing – masing bidang;
7. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
8. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Informasi Aparatur Sipil Negara, Kepala Sub Bidang Profesi, data dan Informasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Sub Bidang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
9. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
10. Memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara dengan mempedomani data dan peraturan yang berlaku agar diperoleh konsep naskah yang benar;

11. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
12. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
13. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
14. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembina staf;
15. Menyimpan dan memelihara kertas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan yang berlaku;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Bidang Formasi, Pengadaan dan Dokumentasi Data terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Pengadaan dan Formasi Aparatur Sipil Negara;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Profesi, Data dan informasi Aparatur Sipil Negara;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara

- (1) Bidang Pengembangan dan Diklat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyusun kebijakan, perencanaan operasional, mengkoordinasikan, memberi petunjuk serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
- b. Penyelenggaraan proses Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama seleksi jabatan;
- e. Memverifikasi dokumen Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
- f. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
- g. Penyelenggaraan perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan, program kerja Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyusun dan menganalisa bahan petunjuk teknis pelaksanaan undang – undang di Bidang Mutasi dan Promosi;

5. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
6. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
7. Memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara, Sub Bidang Kepangkatan Aparatur Sipil Negara dan Sub Bidang Promosi dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
8. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
9. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan masing – masing Sub Bidang pada Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
10. Menandatangani dan memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
11. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara dengan mempedomani data dan peraturan yang berlaku agar diperoleh konsep naskah yang benar;
12. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
13. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

14. Memeriksa hasil kerja bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
15. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
16. Menyimpan dan memelihara dokumen bidang menurut ketentuan;
17. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Bidang Mutasi dan Promosi ASN terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Mutasi dan Pengembangan Karir.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Promosi dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyusun kebijakan, perencanaan operasional, mengkoordinasikan, memberi petunjuk serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuandan peraturan perundang – undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;

- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pengkoordinasian penilaian kinerja aparatur;
 - d. Perencanaan kebutuhan diklat penjurangan dan sertifikasi;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknisfungsional;
 - f. Pengevaluasi hasil penilaian kinerja;
 - g. Pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;
 - h. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan;
 - i. Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai uraian tugas :
- 1. Menyusun rencana kegiatan, program kerja Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 4. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai yang telah ditetapkan;
 - 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;

6. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
7. Mengumpulkan peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis dan pedoman teknis berkaitan dengan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
8. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pada masing – masing dibidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
9. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
10. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan masing – masing Kepala Sub Bidang pada bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;
11. Menandatangani dan memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
12. Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara dengan mempedomani data dan peraturan yang berlaku agar diperoleh konsep naskah yang benar;
13. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
14. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

15. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 16. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
 17. Menyimpan dan memelihara dokumen bidang menurut ketentuan; dan
 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk;
- (4) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara terdiri dari :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Pendidikan, Pelatihan Perjenjangan dan Sertifikasi.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Pendidikan, Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub - Substansi Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara

2.2. SUMBER DAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk setelah era reformasi dan otonomi daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mengurus administrasi kepegawaian pemerintah daerah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang status kepegawaiannya tercatat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhitung pada tanggal 1 April 2021 adalah sebanyak 44 orang PNS yang bekerja aktif.

Dengan pegawai sebanyak tersebut harus menangani Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 6535 orang (Per 1 April 2021) sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terinci seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Pendidikan		Pangkat/Gol		Eselon		Jenis Kelamin	
	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
1	S2	4	Gol. IV	5	Es. II-a	-	L	21
2	D4/S1	27	Gol. III	33	Es. II-b	1	P	25
3	D3	6	Gol. II	8	Es. III	4		
4	D2		Gol. I	-	Es. IV	11		
5	D1							
6	SMA	9						
7	SMP							
8	SD							
	Jumlah	46		46		16		46

Tingkat pendidikan PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mayoritasnya adalah D.IV/S1 yaitu sebanyak 27 orang, disusul pendidikan SMA sebanyak 9 orang, D.III sebanyak 6 orang, kemudian SMA sebanyak 4 orang. PNS dengan golongan III adalah yang terbanyak yaitu 33 orang, kemudian golongan II sebanyak 8 orang, dan golongan IV sebanyak 5 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan

NO	U R A I A N	JUMLAH/SATUAN
1	Ruang Kerja Kepala Badan	1 Ruang
2	Ruang Kerja Sekretariat	3 Ruang
3	Ruang Kerja Bidang Formasi, Pengadaan dan Dokumentasi Data	3 Ruang
4	Ruang Kerja Bidang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun	3 Ruang
5	Ruang Kerja Bidang Pengembangan dan Pengendalian	3 Ruang
6	Ruang Rapat	1 Ruang
7	Dapur	1 Ruang
8	Mushala	1 Ruang
10	Kamar mandi/WC	4 ruang
11	Gudang	1 ruang

Sumber: Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2020

Aset yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagai berikut:

Jumlah asset pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan

NO	URAIAN/JENIS	JUMLAH/SATUAN
1	Meja Kursi Esselon II	1 unit
2	Meja Kursi Esselon III	4 unit
3	Meja Kursi Esselon IV	11 unit

4	Meja Kursi Staf	18 unit
5	Filling Cabinet	6 buah
6	Komputer	23 unit
7	Printer	18 Unit
8	Laptop	13 unit
9	Infokus	3 unit
10	Mesin Ketik Manual	7 Unit
11	Kendaraan Beroda empat	3 Unit
12	Kendaraan Beroda dua	5 Unit
13	Brankas	1 buah
14	Jaringan Website BKPSDM	1 Jaringan
15	Papan Informasi Kepegawaian	1 Buah

Sumber: Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2020

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan indikator kerjanya guna memenuhi kinerja pelayanan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

	D.III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
	S.1/D.IV		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	100	100	100	100	100
	S.2		1	4	-	3	2	1	4	-	3	2	100	100	100	100	100
	S.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
4.	Perkembangan Jumlah PNS mengikuti Pendidikan /Izin Belajar.	Jumlah PNS mengikuti Pendidikan /Izin Belajar.															
	D.III		6	7	4	7	5	6	7	4	7	5	100	100	100	100	100
	S.1/D.IV		85	142	161	107	87	85	142	161	107	87	100	100	100	100	100
	S.2		29	34	31	39	9	29	34	31	39	9	100	100	100	100	100
	S.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Capaian dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam aspek pelayanan umum pada program kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dapat dilihat dalam tabel berikut ;

Tabel 2.5
CAPAIAN DAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANBADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN 2020	TARGET						KE T
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	PELAYANAN FUNGSI PENUNJANG								
	Kepegawaian serta Pendidikan danPelatihan								
a	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan danpelatihan struktural (%)	29 %	39 %	49 %	59 %	69 %	79 %	89 %	
b	Jumlah jabatan pimpinan tinggipada instansi pemerintah	33	35	35	35	35	35	35	
c	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1,795	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	
d	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	4,678	4,940	5,019	4,906	4,731	4,548	4,330	

Dalam tabel capaian dan target kinerja di atas, dapat dilihat bahwa capaian persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural pada tahun 2020 sebesar 29 persen dan ditargetkan bertambah setiap tahunnya. Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jumlah jabatan administrasi adalah tetap, sedangkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu ditargetkan lebih sedikit.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta indikator yang telah ditetapkan, kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dasarnya dapat dikatakan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra BKPSDM Tahun 2016-2021.

Adapun indikator capaian kinerja bidang kepegawaian yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2016 – 2021 dapat dijelaskan dalam 4 (empat) indikator kunci yang selama ini digunakan, yakni :

1. Perkembangan jumlah PNS di Kabupaten Pesisir Selatan menurut tingkat pendidikan.
2. Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKPSDM dan jumlah peserta.
3. Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan.
4. Perkembangan jumlah PNS pendidikan tugas belajar.

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagaimana berikut :

1. Perkembangan jumlah PNS di Kabupaten Pesisir Selatan menurut tingkat pendidikan.

Jika diperhatikan, komposisi pegawai yang berada di Pemkab Pesisir Selatan periode Tahun 2016-2021, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Selatan Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2021

No	Tingkat Pendidikan	Tahun						Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1 April)	
1	SD	34	25	14	13	11	11	
2	SLTP	60	59	50	51	46	45	
3	SLTA	1182	1038	1020	1029	890	765	
4	Diploma I, II, III	1418	1408	1344	1365	1195	1282	
5	S.1/D.IV	4089	4232	4008	3938	3970	4020	
6	S.2 (Magister)	401	405	391	405	394	412	
7	S.3 (Doktor)	0	1	1	1	0	0	
Jumlah		7184	7168	6828	6802	6506	6535	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas PNS Kabupaten Pesisir Selatan berpendidikan S.1/D.IV, dan masih memiliki PNS dengan latar belakang pendidikan yang rendah yaitu tingkat SD dan SMP. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki PNS dengan latar belakang S3, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan belum adanya kesempatan bagi PNS Pesisir Selatan untuk melanjutkan studinya.

2. Perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan BKPSDM dan jumlah peserta.

Untuk melihat perkembangan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah selama lima tahun dapat kita lihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Pelaksanaan Diklat yang Dilaksanakan
BKPSDM dan Jumlah Peserta Tahun 2016-
2021

No	Nama Diklat	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelatihan Dasar/LATSAR	-	140	66	238	-	142
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	-	-	30	30	-	-
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	-	6	8	4	2	-
4	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II (PKN)	-	-	4	-	-	2
5	Diklat Teknis/ Fungsional	-	-	70	30	-	-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pelaksanaan Pelatihan Dasar/Latsar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil bergantung pada penerimaan CPNS baik dari formasi umum maupun dari tenaga honorer. Demikian juga pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP), Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN) sangat tergantung pada skala prioritas dan dukungan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan Diklat dilaksanakan dengan pola fasilitasi dan pola kontribusi.

Diklat teknis maupun diklat fungsional yang dilaksanakan baik dilaksanakan langsung oleh BKPSDM maupun dengan pola kontribusi seperti bimbingan teknis, seminar, workshop dan kursus keterampilan merupakan kegiatan berkelanjutan yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan sangat menentukan peningkatan kapasitas dan kualitas pegawai setiap tahun, namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan setiap tahun karena keterbatasan anggaran daerah.

3. Perkembangan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar.

Selama tahun 2016–2021 Badan Kepegawaian Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.8
Jumlah PNS yang Mengikuti
Pendidikan Tugas Belajar Tahun 2016-
2021

No	Jenis Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	D.III	-	-	-	-	-	-
2	S.1/D.IV	-	1	-	-	-	-
3	S.2	1	4	-	3	2	-
4	S.3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	5	-	3	2	-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah PNS yang telah dikeluarkan surat tugas belajarnya selama Tahun 2016–2021 mencapai 11 orang. Diantara jenjang pendidikan tersebut yang paling banyak dikeluarkan surat tugas belajarnya adalah jenjang pendidikan S.2 dengan jumlah 10 orang, S.1 dengan jumlah 1 orang. Sedangkan untuk D.III berjumlah 26 orang dan S.3 hanya 1 orang. Tidak ada surat tugas belajar yang dikeluarkan untuk jenjang pendidikan Doktor (S.3) karena belum adanya tawaran yang tersedia.

4. Perkembangan Jumlah PNS mengikuti Pendidikan/ Izin Belajar.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka kesempatan yang luas kepada seluruh Pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikannya. Baik melalui tugas belajar maupun izin belajar.

Untuk Tahun 2010–2015 Badan Kepegawaian Daerah telah mengeluarkan Surat Keterangan Izin Belajar untuk PNS sesuai daftar tabel berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah PNS yang Mengikuti
Pendidikan/Izin Belajar Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016 – 2021

No	Jenis Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	D.III	6	7	4	7	5	-
2	S.1/D.IV	85	142	161	107	87	74
3	S.2	29	34	31	39	9	9
4	S.3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		120	183	196	153	101	83

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diberikan surat izin belajar sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 836 orang. Dari jumlah tersebut dapat dirincikan untuk PNS yang mengikuti pendidikan/izin belajar untuk pendidikan S.1 : 656 orang, S.2 : 151 orang dan pendidikan Diploma III sebanyak 29 orang.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Yang menjadi tantangan (Threats) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian dan diklat yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat.
2. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun.
3. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian dan diklat harus mengikuti perubahan.

4. Yang menjadi Peluang (Opportunities) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :
 1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai kepegawaian.
 2. Adanya penawaran peningkatan SDM aparatur melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan beasiswa pendidikan formal melalui tugas belajar.
 3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier pegawai.
 4. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah.
 5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan (staf)

Yang menjadi Kekuatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah tentang kepegawaian yang menunjang penyelenggaraan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
2. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
3. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian.
4. Terpenuhinya anggaran dana pada kegiatan-kegiatan prioritas kepegawaian dan pengembangan aparatur

Yang menjadi kelemahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM aparatur BKPSDM memiliki kemampuan IT.
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM yang kurang memadai.
3. Kurangnya pemahaman sebagian aparatur terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian.
4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai dengan disiplin ilmunya.
5. Posisi jabatan struktural dan fungsional PNS yang masih belum terisi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah:

1. Tidak semua SDM aparatur BKPSDM memiliki kemampuan IT.
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM yang kurang memadai.
3. Kurangnya pemahaman sebagian aparatur terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian
4. Masih adanya beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai dengan disiplin ilmunya
5. Posisi jabatan struktural dan fungsional PNS yang masih belum terisi

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan BKPSDM, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
 - a. Jumlah petugas/aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.
 - b. Sarana prasarana pelayanan administrasi BKPSDM yang masih kurang memadai.
 - c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.

2. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi :

- a. Tingkat pemahaman/pendidikan pemakai jasa layanan terhadap peraturan kepegawaian.
- b. Belum terdatanya SDM aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan structural yang kosong di beberapa OPD oleh Baperjakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Kurangnya SDM aparatur di beberapa OPD sehingga penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah: ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”***. Filosofi yang tertuang dalam Visi Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

SEJAHTERA :Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

MAJU :Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, serta memiliki wawasan kedepan.

BERMARTABAT :Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pakerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK.

AKUNTABEL :Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

PROFESIONAL : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan untuk ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”***, maka dilaksanakan melalui enam misi yaitu :

Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih,Efektif, Demokratis, dan Transparan.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat

Misi 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Potensi Dan Unggulan Daerah.

Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman Dan Berkesan.

Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Beriman, Kreatif, dan Berdaya Saing

Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenram dan Dinamis

Misi yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM sebagai pengelola aparatur pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah misi pertama, yaitu: **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Transparan”**.

3.3. Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2020-2024, yaitu : ***“Mewujudkan Pengelola ASN Yang Profesional Dan Berintegritas Untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong ”***.

Filosofi yang terkandung dalam Visi BKN Profesional artinya:

(a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

- (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yang meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan manajemen ASN.
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN.
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020-2024 yaitu ***“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Profesional Dan Berintegritas Tinggi Untuk Mencapai Pemerintahan Yang Berkelas Dunia Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi Presiden Dan Wakil Presiden : “ Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Yang Berlandaskan Gotong Royong ”***.

Adapun aparatur negara yang profesional terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama. Integritas terkandung makna bahwa dalam ASN Kementerian PANRB harus melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antara perkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika.

Dari hasil telaahan visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa visi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen yang dituangkan dalam visi 2021-2026, yaitu: ***“ Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Daerah yang Profesional ”***. Dari hasil telaahan visi BKPSDM Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa visi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan telah sejalan dengan visi BKPSDM Provinsi Sumatera Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir

Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaiberikut:

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten perbatasan.
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata.
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara – Selatan.
5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah.
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Peningkatan dan mendorong potensi sumber daya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alamPembangunan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan.

9. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Strategi penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten perbatasan.
2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata.
3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara – Selatan.
5. Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah.
6. Strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi sumber daya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam.

9. Strategi untuk membangun kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan.
10. Strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yaitu dengan rencana pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian online. Sehingga dengan tersedianya data elektronik tersebut melalui sistem jaringan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian yang baik di era globalisasi.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan kepegawaian sebagai berikut :

- a. Kurang proaktifnya OPD dalam melaksanakan koordinasi kepegawaian karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada Ibu Kota Kabupaten sedangkan yang menjadi pegawai / pemakai jasa layanan tersebar pada Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan, maka yang menjadi kendala adalah jauhnya jarak tempuh pemakai jasa layanan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan butuhnya ekstra waktu karena jarak tempuh antara BKPSDM dengan Stakeholder/Dinas/Instansi terkait baik dalam lingkup Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kab. Pesisir Selatan memiliki permasalahan dengan rendahnya kompetensi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pemetaan potensi kepada sebagian PNS di Kab. Pesisir Selatan. Hasil dari pemetaan potensi diperoleh bahwa hanya sepertiga dari jumlah pegawai yang telah dipetakan memperoleh hasil yang baik. Sehingga ini merupakan masalah yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

b. Belum optimalnya database kepegawaian

Dalam memberikan pelayanan kepada seluruh PNS, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan memiliki aplikasi kepegawaian atau SIMPEG, namun aplikasi ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mempermudah pelayanan kepegawaian. Pengelolaan pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan meningkatkan kinerja pegawai, dan dalam lingkup yang besar akan membawa perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Namun dalam lingkup yang lebih besar akan membawa perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

c. Penataan dan penempatan pegawai OPD yang belum optimal

Penataan dan penempatan pegawai di OPD belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat adanya PNS di OPD yang memiliki banyak pegawai dan ada yang kekurangan pegawai. Penataan dan penempatan pegawai di OPD disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

d. Masih rendahnya disiplin aparat

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman. Kecenderungan banyaknya ditemukan kasus disiplin yang dilakukan oleh PNS di Kab. Pesisir Selatan terutama terkait dengan kasus perceraian menjadi isu penting untuk ditangani oleh BKPSDM Kab. Pesisir Selatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan menggambarkan target dan capaian tertentu dalam satu periode. Dalam konteks ini, periode pencapaian tujuan yang direncanakan adalah selama lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun tujuan yang telah dirumuskan adalah:

“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja Tinggi”.

Tujuan yang telah dirumuskan diatas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Tujuan diatas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang bersifat *observe* yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-menerus.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2021-2026 adalah:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja
2. Meningkatnya Daya Saing ASN
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Sasaran yang ditetapkan diatas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selama periode 2021- 2026. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021-2026

PEJABAT : ESSELON II

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai RB BKPSDM	B (60)	B (60)	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)
			Nilai AKIP BKPSDM	A	A	A	A	A	A
		Meningkatnya Daya Saing ASN	Indeks Profesionalisme ASN	57	57	58	61	66	71

			Indeks Merit Sistem	126	184	250	252	254	255
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	80	80	100	100	100	100

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	100%	100%	100%	100%
	2. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
	3. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai			91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	25%	30%	80%	82%	85%	90%
2. Meningkatkan Manajemen sistem Karir ASN berdasarkan Merit	1. Persentase Merit Sistem Yang Tercapai	32%	46%	63%	63%	64%	64%

system							
3. Meningkatnya Inovasi BKPSDM	1. Jumlah Inovasi BKPSDM	1	1	1	1	1	1

KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2	2	2	2	2	2
	2. Jumlah rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang di susun	4	4	4	4	4	4
	3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2	2
2. Meningkatnya Pelaksanaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan	1. Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2	2
3. Meningkatnya Inovasi Bidang BKPSDM	1. Jumlah Inovasi Bidang BKPSDM	1	1	1	1	1	1
4. Meningkatnya Kualitas layanan Internal BKPSDM	1. Jumlah Pemenuhan ASN BKPSDM yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja	91	91	91	91	91	91
	2. Jumlah ASN BKPSDM Yang Hadir Tepat Waktu	45	45	45	45	45	45
	3. Jumlah Pengurusan KGB ASN BKPSDM Yang Tepat Waktu	20	20	20	20	20	20
	4. Jumlah Sarana dan Prasarana	20	20	20	55	29	24
	5. Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	2	2	2	10	10	10

	6. Jumlah dokumen publik dan dipublish	10	10	10	10	10	10
5. Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	1. Jumlah pengembangan Modul pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat	1400	1400	1400	1100	1100	1000
	3. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun	345	313	314	346	381	384
	4. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karpeg	225	300				
	5. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karis/Karsu	225	300	250	150	150	150
	6. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat tugas belajar	117	60	50	50	50	50
	7. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah dalam kabupaten	40	54	50	48	46	45
	8. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah keluar kabupaten	40	54	50	48	46	45
	9. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah masuk kabupaten	40	54	50	48	46	45
	10. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pembekalan Pranikah	50	50	55	60	65	70
	11. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Proses Perceraian	30	30	25	20	18	17

1. Terlaksananya Penyusunan Dan Pengadaan Formasi ASN Berdasarkan Anjab dan ABK	1. Jumlah Formasi Pegawai yang dibutuhkan di Daerah Berdasarkan Anjab dan ABK	345	313	314	346	381	384
	2. Jumlah Pelamar Yang Lulus CPNS dan PPPK	654	205	1269	2900	250	200
	3. Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	75	75	77	78	83	85
	4. Persentase Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	25	25	30	35	40	50
	5. Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	1	5	10	25	50	75
2. Meningkatnya Pengembangan Karir ASN	1. Jumlah Peserta yang Lulus Administrasi dalam Pengisian JPT	15		15		40	40
	2. Jumlah PNS yang telah mengikuti pemetaan potensi			40	45	47	50
	3. Jumlah PNS yang melakukan ujian dinas		200	200	100	100	100
	4. Jumlah Tugas Belajar yang diterbitkan	61	55	60	65	68	70
	5. Jumlah PNS yang dipromosi	200	200	40	45	46	50
3. Meningkatnya Kompetensi ASN	1. Jumlah PNS yang Diklat PKN, PKA, PKP	10	10	6	30	30	30
	2. Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional (ujian kompetensi, kenaikan		3	34	40	60	80

	jenjang)						
	3. Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis	10	10	200	240	280	320
	4. Jumlah PNS yang Mengikuti Latsar	143	29			250	200
	5. Jumlah Pembekalan Dasar PPPK			446	1269	2900	100
	6. Jumlah Bimbingan Teknis, Coaching clinic, Sosialisasi		2	4	6	10	15
4. Meningkatnya Manajemen Kinerja	1. Jumlah PNS yang telah dilakukan penilaian kinerja	6000	6000	5700	5400	5100	4800
	2. Jumlah PNS Yang dilakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi	6000	6000	5700	5400	5100	4800
	3. Jumlah Penurunan Pelanggaran Disiplin	17	9	8	7	7	6
	4. Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan		400	200	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021- 2026

Misi : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan Perkantoran Tersusunnya Dokumen, Pelaksanaan dan Evaluasi	Konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD
	Meningkatnya Daya Saing ASN	• Penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah berbasis kompetensi.	1. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan kepegawaian, meningkatkan pola-pola pengembangan

		<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan punishment dan reward bagi aparatur • Penyelenggaraan Penilaian Kinerja ASN • Pendataan Kebutuhan ASN, Perekrutan sampai pengangkatan ASN • Mutasi, Promosi dan Kenaikkan Pangkat ASN sesuai Kompetensi 	<p>karir pegawai melalui sistem merit, pendidikan kedinasan, memberikan bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar.</p> <p>2. Meningkatkan penerapan punishment dan reward untuk aparatur.</p>
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan mindset petugas pelayanan; 2. Peningkatan sarana dan Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan administrasi (Sekretariat Negara, Kementerian PAN dan RB, BKN dan 	<p>Konsistensi pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian dan mewujudkan inovasi yang berkualitas</p>

		BKPSDM dan BPSDM Provinsi Sumatera Barat).	
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan adalah didasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021– 2026.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
- b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributkelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
- g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD;

- j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD.

5. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pengadaan Mebel.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
- b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- e. Pengelolaan Data Kepegawaian;
- f. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.

2. Mutasi dan Promosi ASN

- a. Pengelolaan Mutasi ASN;
- b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
- c. Pengelolaan Promosi ASN.

3. Pengembangan Kompetensi ASN

- a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
- b. Pengelolaan Assessment Center;
- c. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;
- d. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
- e. Penyusunan Administrasi Diklat dan Jabatan Fungsional;
- f. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN;
- g. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
- h. Pemberian Bantuan dan pengelolaan administrasi ijin / tugas belajar;
- i. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN.

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- b. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai;
- c. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai;
- d. Pembinaan Disiplin ASN;
- e. Penyelenggaraan Baperjakat;
- f. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai;
- g. Pemeriksaan Kesehatan Bagi ASN yang Sakit Menahun;

- h. Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin ASN;
- i. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
- j. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
- k. Pembekalan ASN yang Memasuki Purnabakti;
- l. Pemberian Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX tahun;
- m. Penyelenggaraan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
- n. Penyelenggaraan Tim Penilaian Kinerja ASN;
- o. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian.

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Kompetensi Teknis

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

2. Sertifikasi , Kelembagaan , Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia disesuaikan dengan Rencana Aksi Bupati Pesisir Selatan (terlampir).

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel terlampir.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KEMUNGKINAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAL. PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
X.XX	PEMUNGKINAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya pemertintahan yang akuntabel dan berkarya	Milai RB BPPSDM	8 (60)	5.171.374,025	8 (60)	6.048.145,995	8 (65)	5.202.800,002	8 (66)	8.574.234,639	8 (67)	8.046.225,103	8 (68)	8.490.914,613
X.XX.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPSDM	Milai ADP BPPSDM Persentase Kelengkapan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Persentase Kelengkapan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Persentase Kelengkapan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	A 100 0 Delay Pelaporan 91-100	A 100 0 Delay Pelaporan 91-100	A 100 0 Delay Pelaporan 91-100	71.283,380 100 0 Delay Pelaporan 91-100	A 100 0 Delay Pelaporan 91-100	46.394,480 100 0 Delay Pelaporan 91-100	A 100 0 Delay Pelaporan 91-100	320.000,000 100 0 Delay Pelaporan 91-100	A 100 0 Delay Pelaporan 91-100	320.000,000 100 0 Delay Pelaporan 91-100	A 100 0 Delay Pelaporan 91-100	120.000,000
X.XX.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	30.500,000	1	10.000,000	1	10.000,000	1	50.000,000	1	50.000,000	1	50.000,000
X.XX.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	7.500,000	1	7.500,000	1	7.500,000	2	15.000,000	2	15.000,000	2	15.000,000
X.XX.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	15.000,000	1	15.000,000	1	15.000,000	1	15.000,000	1	15.000,000	1	15.000,000
X.XX.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	6.050,000	1	6.050,000	1	6.050,000						
X.XX.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
X.XX.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	4	9.500,000	4	9.500,000	4	9.500,000	4	15.000,000	4	15.000,000	4	15.000,000
X.XX.1.201.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	40.783,380	4	40.783,380	4	11.344,460	12	25.000,000	12	25.000,000	12	25.000,000
X.XX.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPSDM	Persentase Kelengkapan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Persentase Kelengkapan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Persentase Kelengkapan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 0 Delay Pelaporan 91-100	4.423.352,115 100 0 Delay Pelaporan 91-100	100 0 Delay Pelaporan 91-100	4.668.922,115 100 0 Delay Pelaporan 91-100	100 0 Delay Pelaporan 91-100	4.356.633,885 100 0 Delay Pelaporan 91-100	100 0 Delay Pelaporan 91-100	4.829.904,639 100 0 Delay Pelaporan 91-100	100 0 Delay Pelaporan 91-100	5.406.895,103 100 0 Delay Pelaporan 91-100	100 0 Delay Pelaporan 91-100	5.831.584,613
X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	4.325.752,115	42	4.533.152,115	46	4.264.547,362	45	4.769.904,639	45	5.246.895,103	45	5.771.584,613
X.XX.1.202.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan dan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	99.000,000	36	100.800,000	20	85.310,993	12	100.000,000	12	100.000,000	12	100.000,000
X.XX.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	15	35.000,000	12	6.575,600	12	60.000,000	12	60.000,000	12	60.000,000	12	60.000,000

X.XX.1.206.10	Penyediaan Asap Dinamis pada SFPD	Terlaksananya Penastabilan Asap Dinamis pada SFPD	Jumlah Dokumen Penastabilan Asap Dinamis pada SFPD	Dokumen					50	5.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
X.XX.1.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SFPD	Terlaksananya Dukungan pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SFPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SFPD	Dokumen					12	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
X.XX.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPSDM	100	100	100.000.000	100	100	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	805.000.000
X.XX.1.207.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diredanakan	0 Delay Pelaporan 91-100	0 Delay Pelaporan 91-100					91-100				0 Delay Pelaporan 91-100			
X.XX.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diredanakan	2		100.000.000											105.000.000
X.XX.1.207.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel yang Diredanakan														202.000.000
X.XX.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPSDM	100	100	139.002.990	100	100	100	100	137.978.170	100	138.130.000	100	138.130.000	100	396.130.000
X.XX.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diredanakan	0 Delay Pelaporan 91-100	0 Delay Pelaporan 91-100									0 Delay Pelaporan 91-100			
X.XX.1.208.3	Penyediaan Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Diredanakan	12	12	102.016.130	12	12	12	12	89.245.383	12	190.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
X.XX.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diredanakan	12	12	36.967.660	12	12	12	12	48.712.807	12	171.130.000	12	171.130.000	12	171.130.000
X.XX.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemeliharaan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPSDM	100	100	162.806.160	100	100	100	100	202.537.701	100	315.000.000	100	315.000.000	100	315.000.000
X.XX.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Delay Pelaporan 91-100	0 Delay Pelaporan 91-100									0 Delay Pelaporan 91-100			
X.XX.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diredanakan	12	12	141.456.160	12	12	12	12	40.000.000	12	315.000.000	12	315.000.000	12	315.000.000
X.XX.1.209.6	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya yang Diredanakan	12	12	21.350.000	12	12	12	12	39.764.964	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
X.XX.1.209.8	Pemeliharaan Aset TK Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset TK Berwujud yang Diredanakan	1	1	32.805.000	1	1	1	1	14.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
X.XX.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diredanakan	1	1	32.805.000	1	1	1	1	78.292.737	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000

Kinerja	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Meningkatnya Daya Saing ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	57	1,672,771,464	57	1,783,005,850	58	701,744,300	61	3,724,000,000	66	4,293,000,000	71	4,559,000,000
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Merit Sistem BKPSDM	Indeks Nilai	126		184		250		252		254		255	
Meningkatnya Inovasi BKPSDM	Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	Nilai	80		80		100		100		100		100	
Meningkatnya Inovasi BKPSDM	Jumlah Inovasi BKPSDM	Inovasi	1	781,262,860	1	786,497,600	1	289,738,670	1	820,000,000	1	975,000,000	1	1,105,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	25		30		80		82		85		90	
Meningkatnya Manajemen sistem Karir ASN berdasarkan Merit system	Persentase Merit Sistem Yang Tercapai	Persen	32		46		63		63		64		64	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	345		313	100,000,000	314	100,000,000	346	50,000,000	381	80,000,000	384	90,000,000
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	654	629,765,340	205	500,000,000	1269	100,000,000	2900	500,000,000	250	600,000,000	200	700,000,000
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	345	52,066,700	313	52,068,700	314	16,016,270	346	60,000,000	381	75,000,000	384	85,000,000
Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6000	62,588,900	6000	62,588,900	5700	55,932,000	5,400	100,000,000	5,100	100,000,000	4,800	100,000,000
Terlaksananya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	225	36,840,020	300	36,840,000	250	17,790,400	150	50,000,000	150	50,000,000	150	50,000,000
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan			12	35,000,000			12	60,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000
Meningkatnya Inovasi BKPSDM	Jumlah Inovasi BKPSDM	Inovasi	1	448,388,484	1	448,368,400	1	185,000,000	1	547,000,000	1	547,000,000	1	547,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	25		30		80		82		85		90	
Meningkatnya Manajemen sistem Karir ASN berdasarkan Merit system	Persentase Merit Sistem Yang Tercapai	Persen	32		46		63		63		64		64	
Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	645	113,970,830	200	113,970,800	200	60,000,000	144	97,000,000	138	97,000,000	132	97,000,000
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1600	184,643,734	1400	184,643,700	1200	90,000,000	1100	200,000,000	1100	200,000,000	1000	200,000,000

Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	30	149,753,920	100	149,753,900	5	5,000,000	2	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000
Meningkatnya Inovasi BKPSDM	Jumlah Inovasi BKPSDM	1	340,608,310	1	395,608,200	1	65,389,960	1	1,640,000,000	1	2,015,000,000	1	2,082,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	25		30		80		82		85		90	
Meningkatnya Manajemen sistem Karir ASN berdasarkan Merit system	Persentase Merit Sistem Yang Tercapai	32		46		63		63		64		64	
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	9	119,169,900	30	74,169,900	40	19,639,950	45	55,000,000	47	60,000,000	50	67,000,000
Terlaksananya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	185	138,193,580	185						300	200,000,000	300	200,000,000
Terlaksananya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN									2	50,000,000	2	50,000,000
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	254	83,144,830	20	83,144,800	2	20,000,000	65	1,475,000,000	68	1,535,000,000	70	1,575,000,000
Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			1	100,000,000	2	5,000,000			2	50,000,000	2	50,000,000
Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina					175	20,750,000	135	110,000,000	195	120,000,000	240	140,000,000
Meningkatnya Inovasi BKPSDM	Jumlah Inovasi BKPSDM	1	102,631,710	1	152,631,660	1	191,615,660	1	717,000,000	1	756,000,000	1	825,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	25		30		80		82		85		90	
Meningkatnya Manajemen Merit system	Persentase Merit Sistem Yang Tercapai	32		46		63		63		64		64	
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2000	30,356,750	6000	30,356,750	40	62,265,400	5400	250,000,000	5100	250,000,000	4800	250,000,000
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					100	20,212,500	100	52,000,000	100	55,000,000	100	62,000,000
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			100	50,000,000			100	24,000,000	100	26,000,000	100	28,000,000
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur											3	50,000,000
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	88	72,274,960	20	72,274,900	20	79,137,780	67	210,000,000	72	245,000,000	76	270,000,000
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					2	15,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani					12	15,000,000	20	61,000,000	18	60,000,000	17	45,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahun;
5. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Renstra- OPD Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan OPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
10. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;

12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SA SARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja Tinggi	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Profesionalisme ASN	57	62	71	77	81	85
			Indeks Inovasi Daerah	5.150	6.300	7.500	8.500	9.500	10.500
		Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja.	Indeks Reformasi Birokrasi	56 (CC)	58 (CC)	60 (B)	62 (B)	64 (B)	65 (B)
			Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68 (B)	70 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	78 (BB)

Berdasarkan penetapan indikator kinerja daerah yang dimuat dalam RPJMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada pada Misi I “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan ” dengan indikator Indeks profesionalitas ASN pada kondisi akhir RPJMD tahun 2026 ditargetkan bernilai 85, dengan adanya Rasionalisasi target indikator maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerapkan pada akhir tahun 2026 dengan target bernilai 71 dengan harapan adanya dukungan untuk dapat mencapai nilai tersebut, antara lain dukungan anggaran sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Indeks Reformasi Birokrasi pada kondisi akhir RPJMD tahun 2026 ditargetkan bernilai 65, dengan harapan adanya dukungan untuk dapat mencapai nilai tersebut, antara lain dukungan Pemerintah Daerah sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Reformasi Birokrasi.

Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan akhir RPJMD tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 10.500, yang mana disandingkan dengan indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM yaitu dengan target 100.

Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan akhir RPJMD tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 78, yang mana disandingkan dengan indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Nilai AKIP BKPSDM yaitu dengan target A.

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijaksanaan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan- kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategis pembangunan, sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah ke depan. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana kerja tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Kinerja OPD.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.



LAMPIRAN

**BAB IV. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESIRSELATAN
TAHUN 2022**

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah PenanggungJawab Anggaran
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program,Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV	
					Volume	Satuan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		A	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				14.783.470.000							BKPSDM
		1,1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara UrusanPemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		6505	Org	50.000.000							BKPSDM
		1,2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.				11.486.470.000							BKPSDM
		a.	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				8.987.000.000							BKPSDM
		a.1	Bidang Pendidikan		2609		5.207.000.000							BKPSDM
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan	1	Penyusunan Penerapan SPM Pendidikan Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Penerapan SPM Pendidikan Dasar untuk 2 orang PNS	2	Org	10.000.000	Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Kasubag Perencanaan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		2	Biimbingan teknis sistem pelaporan kinerja dan keuangan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanBiimbingan teknis sistemlaporan kinerja dan keuangan untuk 2 orangPNS	2	Org	10.000.000	Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Kasubag Keuangan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		3	Sosialisasi Pencegahan Narkoba di lingkungan Kerja (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Narkoba di lingkungan Kerja untuk 100 orang PNS	100	Org	150.000.000	Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		4	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik untuk 600 orang PNS	600	Org	800.000.000	Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		5	Pelatihan Perencanaan PAUD (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPerencanaan PAUD untuk 280 orang PNS	280	Org	350.000.000	Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		6	Pelatihan Manajemen Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Sekolah Dasar untuk 280 orang PNS	280	Org	450.000.000	Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran				
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV					
					Volume	Satuan												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			7	Pelatihan Pengawas Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPengawas Sekolah Dasar untuk 25 orang PNS	25	Org	462.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				8	Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus (Klasikal/Non Klasikal)	TerlaksananyaPelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus untuk 100 orang PNS	100	Org	125.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				9	Pelatihan Pengembangan Teknologi Pembelajaran (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPengembangan Teknologi Pembelajaran untuk 400 orang PNS	400	Org	600.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				10	Pelatihan Pengembangan Sumber Belajar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Sumber Belajar untuk 280 orang PNS	280	Org	450.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				11	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPengembangan Media Pembelajaran untuk 280orang PNS	280	Org	450.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				12	Pelatihan Administrasi Sekolah dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanAdministrasi Sekolah dasar untuk 160 orang PNS	160	Org	250.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				13	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah Dasar untuk 100orang PNS	100	Org	1.100.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar /Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				a.2	Bidang Kesehatan		756		3.780.000.000									
						1	Pelatihan Penerapan SPM bidang kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPenerapan SPM sebanyak 72 orang PNS	72	Org	360.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
						2	Pelatihan Tata Kelola Rumah Sakit (RS) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Rumah Sakit (RS) sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			3	Pelatihan Sistem Akuntabilitas RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Akuntabilitas RS sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				4	Pelatihan Sistem Remunerasi RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Remunerasi (RS) sebanyak 40 orang PNS	40	Org	200.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				5	Pelatihan Sistem Pengelolaan SDM RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Pengelolaan SDM (RS) sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				6	Pelatihan Sistem Keuangan RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Keuangan RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				7	Pelatihan Sistem Akuntansi RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Akuntansi RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				8	Pelatihan Sistem Rencana Bisnis dan Anggaran RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Rencana Bisnis dan Anggaran RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				9	Pelatihan Sistem Informasi RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Informasi RS sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				10	Pelatihan Sistem Manajemen Material RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Manajemen Material RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		11	Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan sebanyak 50 orang PNS	50	Org	250.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			12	Pelatihan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPromosi Kesehatan Dinas Kesehatan RS sebanyak 6 orang PNS	6	Org	30.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				13	Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanKesehatan Reproduksi Remaja sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				14	Pelatihan Penyehatan Air (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPenyehatan Air sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				15	Pelatihan Higiene, Sanitasi, Makanan dan Minuman (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanHigiene, Sanitasi, Makanan dan Minuman sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				16	Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanSistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				17	Pelatihan Pengolahan Limbah Cair dan Limbah RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pengolahan Limbah Cairdan Limbah RS sebanyak 4 orang PNS	4	Org	20.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				18	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				19	Pelatihan Penerapan Puskesmas Menjadi BLUD dan Mekanisme Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya PelatihanSistem Keuangan RS sebanyak 210 orang PNS	210	Org	1.050.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		20	Pelatihan Disain dan Implementasi JKN menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Disain dan Implementasi JKNmenuju Kepesertaan Seluruh Penduduk sebanyak 5 orang PNS	5	Org	25.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan								% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah PenanggungJawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program,Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		21	Pelatihan Kepemimpinan Kesehatan bagi Kepala Puskesmas (Klasikal/NonKlasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Kesehatan bagi Kepala Puskesmas sebanyak 21 orang PNS	21	Org	105.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			22	Pelatihan Surveilans Kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanSurveilans Kesehatan sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			23	Pelatihan Kesehatan Kerja bagi Petugas Kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanKesehatan Kerja bagi Petugas Kesehatan sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			24	Pelatihan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			25	Pelatihan Pengawasan Pos Market Produk Makanan & Minuman Industri Rumah Tangga (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Pos MarketProduk Makanan & Minuman Industri Rumah Tangga sebanyak 3 orang PNS	3	Org	15.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			26	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang danJasa sebanyak 50 orangPNS	50	Org	250.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			b. Urusan Pilihan						2.499.470.000							
			b.1 Bidang Pariwisata				28		800.000.000							
			1	Penerapan NSPK Bidang Pariwisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya pelatihan NSPK pariwisata untuk 2 orang PNS	2	orang	50.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			2	Pengelolaan daya tarik wisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan daya tarik wisata untuk 2 orang PNS	2	orang	50.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			3	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan kawasan strategis pariwisata untuk 2 orang PNS	2	orang	50.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				4	Pengelolaan destinasi pariwisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan destinasi pariwisata untuk 2 orangPNS	2	orang	50.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				5	Pemasaran Pariwisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Pariwisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				6	Pelatihan Hotel dan Restoran (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanHotel dan Restoran untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				7	Pelatihan Tata Boga (<i>Food Production</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Boga untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				8	<i>Pelatihan Tour Leader (Klasikal/Non Klasikal)</i>	Terlaksananya PelatihanTour Wisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				9	Pelatihan Tata Hidang (<i>Food and Beverage Service</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanTata Hidang	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				10	Pelatihan Kantor Depan (<i>Front Office</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanKantor Depan (front desk) untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				11	Pelatihan Tata Graha (<i>House Keeping</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanTata Graha untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			12 Pelatihan Agen Perjalanan (<i>Travel Agencies</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Agen Perjalanan untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				13 Pelatihan Kerja Operasional Tur (<i>Tour Operation</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanKerja Operasional Tur untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				14 Pelatihan Pemandu Wisata Selam (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Selamuntuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				15 Kepemanduan Wisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemanduan Wisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				16 Kepemanduan Museum (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemanduan Moseum untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				17 Kepemanduan Ekowisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemanduan Ekowosata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				18 Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPemandu Wisata Arung Jeram untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				19 Perencanaan Pariwisata Daerah (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Pariwisata Daerah untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				20 Pengembangan Wisata Religi (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Wisata Religi	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Perekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab. Pesisir Selatan		21	Perencanaan Pariwisata Terintegrasi (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Pariwisata Terintegrasi untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			22	Pelatihan Membangun Kemitraan Pengembangan & Promosi Pariwisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Membangun Ke mitraan Pengembangan dan Promosi Pariwisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			23	Pelatihan Pola Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pola Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			24	Pengelolaan SDM Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat.(Klasikal/NonKlasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan SDM Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			25	Pelatihan Speaking English (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Speaking English untuk 10 orang PNS	10	orang	100.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			b.2 Bidang Pertanian						685.000.000							
			1	Pelatihan NSPK Bidang Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan NSPK Bidang Pertanian sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			2	Pelatihan Teknis Irigasi (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Irigasi sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			3	Pelatihan Penyuluh Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penyuluh Pertanian sebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			4	Pelatihan Produksi Benih Tanaman (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Produksi Benih Tanaman sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		5	Pelatihan Fasilitator Tanaman Organik (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanFasilitator Tanaman Organik sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			6	Pelatihan Inspektur Tanaman Organik (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanInspektur Tanaman Organik sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			7	Pelatihan Teknologi Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanTeknologi Pertanian sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			8	Pelatihan Komoditi Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanKomoditi Pertanian sebanyak 2orang	2	orang	10.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			9	Pelatihan Budidaya Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanBudidaya Pertanian sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			10	Pelatihan Agrobisnis (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Agrobisnis sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (PP) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian sebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			12	Pelatihan Teknis Padi bagi Penyuluh Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanTeknis Padi bagi Penyuluh Pertaniansebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			13	Pelatihan Teknis Jagung bagi Penyuluh Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanNSPK Bidang Pertaniansebanyak 10 orang	10	orang	50.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran			
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV				
					Volume	Satuan											
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		14	Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
			15	Pelatihan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Usaha Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Usaha Pertanian sebanyak 1 orang	1	Orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
			b.3 Bidang Kelautan dan Perikanan				246		1.014.470.000							BKPSDM	
			1	Penerapan NSPK bidang Kelautan dan Perikanan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penerapan NSPK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk 1 orang ASN	1	Org	10.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
			2	Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota untuk 50 orang ASN	50	Org	50.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
			3	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI) untuk 50 orang ASN	50	Org	50.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
			4	Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan untuk 21 orang ASN	21	Org	420.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
		5	Pengelolaan pembudidayaan ikan.(Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan pembudidayaan ikan untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM			
		6	Teknik pembuatan alat tangkap ikan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Teknik pembuatan alat tangkap ikan untuk 50 orang ASN	50	Org	50.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM			
		7	Pengolahan tradisional : pembuatan ikan asar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan tradisional : pembuatan ikan asar untuk 50 orangASN	50	Org	80.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM			

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		8	Manajemen Pengendalian Hama Penyakit Ikan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan ManajemenPengendalian Hama Penyakit Ikan untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			9	Manajemen Pemberian Pakan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pemberian Pakan untuk3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			10	Manajemen/Pengelolaan Kualitas Air (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen/Pengelolaan Kualitas Air untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			11	Panen dan Pasca Panen (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Panen danPasca Panen untuk 7orang ASN	7	Org	24.470.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			12	Budi Daya Ikan Air Tawar dan Air Laut (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Budi Daya IkanAir Tawar dan Air Laut untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			13	Manajemen Pengembangan Wisata Bahari (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengembangan WisataBahari untuk 2 orang ASN	2	Org	30.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan turunannya (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan turunannya untuk100 orang	100	Org	100.000.000	BKPSDM	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			b	Pelatihan Pengelolaan Assessment Center (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan PengelolaanAssessment Center untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	BKPSDM	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			c	Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pendidikan LanjutanASN untuk 4 orang	4	Org	400.000.000	Universitas	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		a	Pelatihan Wawasan kebangsaan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Wawasan kebangsaan untuk 20 orang	20		100.000.000	BPSDM	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			b	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN (PKN, PKP, PKA, Prajabatan dan JFT)				2.547.000.000							BKPSDM	
				1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Nasional untuk 3 orang JPT	3	Org	240.000.000	LAN	JPT	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk 5 orang Jabatan Administrator	5	Org	250.000.000	PPSDM/BPSDM	Administrator	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk 30 orang Pengawas	30	Org	800.000.000	PPSDM/BPSDM	Pengawas	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur	PNSD Kab.Pesisir			4	Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Camat	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Camat untuk 3 orang	3	Org	105.000.000	PPSDM/BPSDM	Camat	25%	50%	75%
				5	Pelatihan Dasar CPNS	Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS untuk 100 orang	50	Org	450.000.000	PPSDM/BPSDM	CPNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				6	Pelatihan Jabatan Fungsional Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Pertanian untuk 10 orang	10	Org	152.000.000	BPPSDMP	JFT Rumpun Pertanian	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				7	Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana untuk 6 orang	6	Org	150.000.000	Pusbindiklatren-Bappenas	JFT Perencana	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Selatan		8	Pelatihan Jabatan Fungsional Perikanan dan Kelautan	Terlaksananya PelatihanJabatan Fungsional Perikanan dan Kelautanuntuk 4 orang	4	Org	100.000.000	BPSDMKP	JFT Rumpun Perikanan dan Kelautan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			9	Pelatihan Jabatan Fungsional Pariwisata	TerlaksananyaPelatihan Jabatan Fungsional Pariwisata untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	Pusbang SDM Parekraf	JFT Rumpun Pariwisata	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			10	Pelatihan Jabatan Fungsional Kepegawaian	Terlaksananya PelatihanJabatan Fungsional Kepegawaian untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	PusbangASN BKN	JFT Rumpun Kepegawaian	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			11	Pelatihan Jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan untuk 4orang	4	Org	100.000.000	Pusdiklat Kemendikbud	JFT Rumpun Pendidikan dan Kebudayaan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

									Kebudayaan Kab.Pessel						
			5	Pelatihan Perencanaan PAUD (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan PAUD untuk 280 orang PNS	280	Org	350.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbava/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			6	Pelatihan Manajemen Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Sekolah Dasar untuk 280 orang PNS	280	Org	450.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbava/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			7	Pelatihan Pengawas Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengawas Sekolah Dasar untuk 25 orang PNS	25	Org	462.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbava/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		8	Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus (Klasikal/Non Klasikal)	TerlaksananyaPelatihanPenyusunan Kurikulum dan Silabus untuk 100 orang PNS	100	Org	125.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumba r/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			9	Pelatihan Pengembangan Teknologi Pembelajaran (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Teknologi Pembelajaran untuk 400 orang PNS	400	Org	600.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumba r/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			10	Pelatihan Pengembangan Sumber Belajar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Sumber Belajar untuk 280 orang PNS	280	Org	450.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumba r/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			11	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran untuk 280 orang PNS	280	Org	450.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumba r/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			12	Pelatihan Administrasi Sekolah dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanAdministrasi Sekolah dasar untuk 160 orang PNS	160	Org	250.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumba r/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			13	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanManajemen Kepala Sekolah Dasar untuk 100 orang PNS	65	Org	715.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumba r/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			a.2	Bidang Kesehatan			756		3.780.000.000							
				1	Pelatihan Penerapan SPM bidang kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanPenerapan SPM sebanyak 72 orang PNS	72	Org	360.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbang/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				2	Pelatihan Tata Kelola Rumah Sakit (RS) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Rumah Sakit (RS) sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbang/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				3	Pelatihan Sistem Akuntabilitas RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanSistem Akuntabilitas RS sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbang/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan								% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		4	Pelatihan Sistem Remunerasi RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Remunerasi (RS) sebanyak 40 orang PNS	40	Org	200.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			5	Pelatihan Sistem Pengelolaan SDM RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Pengelolaan SDM (RS) sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			6	Pelatihan Sistem Keuangan RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Keuangan RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			7	Pelatihan Sistem Akuntansi RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Akuntansi RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			8	Pelatihan Sistem Rencana Bisnis dan Anggaran RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Rencana Bisnis dan Anggaran RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			9	Pelatihan Sistem Informasi RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Informasi RS sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			10	Pelatihan Sistem Manajemen Material RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Manajemen Material RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			11	Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan sebanyak 50 orang PNS	50	Org	250.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			12	Pelatihan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan RS sebanyak 6 orang PNS	6	Org	30.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			13	Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		14	Pelatihan Penyehatan Air (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penyehatan Air sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			15	Pelatihan Higiene, Sanitasi, Makanan dan Minuman (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Higiene, Sanitasi, Makanan dan Minuman sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			16	Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			17	Pelatihan Pengolahan Limbah Cair dan Limbah RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pengolahan Limbah Cair dan Limbah RS sebanyak 4 orang PNS	4	Org	20.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			18	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			19	Pelatihan Penerapan Puskesmas Menjadi BLUD dan Mekanisme Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Pelatihan Sistem Keuangan RS sebanyak 210 orang PNS	210	Org	1.050.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			20	Pelatihan Disain dan Implementasi JKN menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Disain dan Implementasi JKN menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk sebanyak 5 orang PNS	5	Org	25.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			21	Pelatihan Kepemimpinan Kesehatan bagi Kepala Puskesmas (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kesehatan bagi Kepala Puskesmas sebanyak 21 orang PNS	21	Org	105.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			22	Pelatihan Surveilans Kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Surveilans Kesehatan sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			23	Pelatihan Kesehatan Kerja bagi Petugas Kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kesehatan Kerja bagi Petugas Kesehatan sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			7	Pelatihan Tata Boga (<i>Food Production</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Boga untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			8	Pelatihan Tour Leader (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tour Wisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			9	Pelatihan Tata Hidang (<i>Food and Beverage Service</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Hidang	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			10	Pelatihan Kantor Depan (<i>Front Office</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kantor Depan (front desk) untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		11	Pelatihan Tata Graha (<i>House Keeping</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Graha untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			12	Pelatihan Agen Perjalanan (<i>Travel Agencies</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Agen Perjalanan untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			13	Pelatihan Kerja Operasional Tur (<i>Tour Operation</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kerja Operasional Tur untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			14	Pelatihan Pemandu Wisata Selam (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Selam untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			15	Kepemanduan Wisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemanduan Wisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			16	Kepemanduan Museum (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemanduan Moseum untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran			
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV				
					Volume	Satuan											
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan				1	Pelatihan NSPK Bidang Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan NSPK Bidang Pertanian sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					2	Pelatihan Teknis Irigasi (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Teknis Irigasi sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					3	Pelatihan Penyuluh Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Penyuluh Pertanian sebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					4	Pelatihan Produksi Benih Tanaman (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Produksi Benih Tanaman sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					5	Pelatihan Fasilitator Tanaman Organik (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Fasilitator Tanaman Organik sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					6	Pelatihan Inspektur Tanaman Organik (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Inspektur Tanaman Organik sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					7	Pelatihan Teknologi Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Teknologi Pertanian sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					8	Pelatihan Komoditi Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Komoditi Pertanian sebanyak 2 orang	2	orang	10.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					9	Pelatihan Budidaya Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Budidaya Pertanian sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
					10	Pelatihan Agrobisnis (Klasikal/Non Klasikal)	Tertindakannya Pelatihan Agrobisnis sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			5	Pengelolaan pembudidayaan ikan.(Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan pembudidayaan ikan untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				6	Teknik pembuatan alat tangkap ikan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Teknik pembuatan alat tangkap ikan untuk 50 orang ASN	50	Org	50.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				7	Pengolahan tradisional : pembuatan ikan asar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan tradisional : pembuatan ikan asar untuk 50 orang ASN	50	Org	80.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				8	Manajemen Pengendalian Hama Penyakit Ikan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengendalian Hama Penyakit Ikan untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				9	Manajemen Pemberian Pakan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pemberian Pakan untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				10	Manajemen/Pengelolaan Kualitas Air (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen/Pengelolaan Kualitas Air untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				11	Panen dan Pasca Panen (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Panen dan Pasca Panen untuk 7 orang ASN	7	Org	24.470.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				12	Budi Daya Ikan Air Tawar dan Air Laut (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Budi Daya Ikan Air Tawar dan Air Laut untuk 3 orang ASN	3	Org	60.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				13	Manajemen Pengembangan Wisata Bahari (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengembangan Wisata Bahari untuk 2 orang ASN	2	Org	30.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah	PNSD Kab.Pesisir Selatan		a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan turunannya (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan turunannya untuk 100 orang	100	Org	100.000.000	BKPSDM	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			b	Pelatihan Pengelolaan Assessment Center (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Assessment Center untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	BKPSDM	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			c	Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pendidikan Lanjutan ASN untuk 4 orang	4	Org	400.000.000	Universitas	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			D	Pelatihan Wawasan kebangsaan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Wawasan kebangsaan untuk 20 orang	20		100.000.000	BPSDM	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			e	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN (PKN, PKP, PKA, Prajabatan dan JFT)				2.997.000.000								BKPSDM
			1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Nasional untuk 3 orang JPT	3	Org	240.000.000	LAN	JPT	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk 5 orang Jabatan Administrator	5	Org	250.000.000	PPSDM/BPSDM	Administrator	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk 30 orang Pengawas	30	Org	800.000.000	PPSDM/BPSDM	Pengawas	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			4	Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Camat	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Camat untuk 3 orang	3	Org	105.000.000	PPSDM/BPSDM	Camat	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		5	Pelatihan Dasar CPNS	Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS untuk 100 orang	50	Org	900.000.000	PPSDM/BPSDM	CPNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			6	Pelatihan Jabatan Fungsional Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Pertanian untuk 10 orang	10	Org	152.000.000	BPPSDMP	JFT Rumpun Pertanian	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			7	Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana untuk 6 orang	6	Org	150.000.000	Pusbindiklatren-Bappenas	JFT Perencana	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			8	Pelatihan Jabatan Fungsional Perikanan dan Kelautan	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Perikanan dan Kelautan untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	BPSDMKP	JFT Rumpun Perikanan dan Kelautan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			9	Pelatihan Jabatan Fungsional Pariwisata	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Pariwisata untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	Pusbang SDM Parekraf	JFT Rumpun Pariwisata	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			10	Pelatihan Jabatan Fungsional Kepegawaian	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Kepegawaian untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	PusbangASN BKN	JFT Rumpun Kepegawaian	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			11	Pelatihan Jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	Pusdiklat Kemendikbud	JFT Rumpun Pendidikan dan Kebudayaan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

**BAB IV. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan	A	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				15.253.470.000							BKPSDM		
		A.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				12.256.470.000							BKPSDM		
		1,1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan PemerintahanKonkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			6505	Org	50.000.000							BKPSDM	
		1,2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.													
		a.	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					8.657.000.000							BKPSDM	
		a.1	Bidang Pendidikan			2579		4.877.000.000							BKPSDM	
				1	Penyusunan Penerapan SPM Pendidikan Dasar (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Penerapan SPM Pendidikan Dasar untuk 2 orang PNS	2	Org	10.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Kasubag Perencanaan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				2	Bimbingan teknis sistem pelaporan kinerja dan keuangan (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Bimbingan teknis sistem pelaporan kinerja dan keuangan untuk 2 orang PNS	2	Org	10.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Kasubag Keuangan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				3	Sosialisasi Pencegahan Narkoba di lingkungan Kerja (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Narkoba di lingkungan Kerja untuk 100 orang PNS	100	Org	150.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				4	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik untuk 600 orang PNS	600	Org	800.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
		5	Pelatihan Perencanaan PAUD (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan PAUD untuk 280 orang PNS	280	Org	350.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
		6	Pelatihan Manajemen Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Sekolah Dasar untuk 280 orang PNS	280	Org	450.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan								% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran			
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV					
					Volume	Satuan												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			7	Pelatihan Pengawas Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengawas Sekolah Dasar untuk 25 orang PNS	25	Org	462.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				8	Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Silabus untuk 100 orang PNS	100	Org	125.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				9	Pelatihan Pengembangan Teknologi Pembelajaran (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Teknologi Pembelajaran untuk 400 orang PNS	400	Org	600.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				10	Pelatihan Pengembangan Sumber Belajar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Sumber Belajar untuk 280 orang PNS	280	Org	450.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				11	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran untuk 280 orang PNS	280	Org	450.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				12	Pelatihan Administrasi Sekolah dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Administrasi Sekolah dasar untuk 160 orang PNS	160	Org	250.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				13	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah Dasar (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah Dasar untuk 100 orang PNS	70	Org	770.000.000	Pusdiklat Kemendikbud/Prov.Sumbar/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pessel	Tenaga Pendidik	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				a.2	Bidang Kesehatan			756		3.780.000.000								
						1	Pelatihan Penerapan SPM bidang kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penerapan SPM sebanyak 72 orang PNS	72	Org	360.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
						2	Pelatihan Tata Kelola Rumah Sakit (RS) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Rumah Sakit (RS) sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan								% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			3	Pelatihan Sistem Akuntabilitas RS (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Akuntabilitas RS sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				4	Pelatihan Sistem Remunerasi RS (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Remunerasi (RS) sebanyak 40 orang PNS	40	Org	200.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				5	Pelatihan Sistem Pengelolaan SDM RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Pengelolaan SDM (RS) sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				6	Pelatihan Sistem Keuangan RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Keuangan RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				7	Pelatihan Sistem Akuntansi RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Akuntansi RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				8	Pelatihan Sistem Rencana Bisnis dan Anggaran RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Rencana Bisnis dan Anggaran RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				9	Pelatihan Sistem Informasi RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Informasi RS sebanyak 20 orang PNS	20	Org	100.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				10	Pelatihan Sistem Manajemen Material RS (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Manajemen Material RS sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				11	Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan sebanyak 50 orang PNS	50	Org	250.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		12	Pelatihan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan RS (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan RS sebanyak 6 orang PNS	6	Org	30.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			13	Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			14	Pelatihan Penyehatan Air (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penyehatan Air sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			15	Pelatihan Higiene, Sanitasi, Makanan dan Minuman (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Higiene, Sanitasi, Makanan dan Minuman sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			16	Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			17	Pelatihan Pengolahan Limbah Cair dan Limbah RS (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pengolahan Limbah Cair dan Limbah RS sebanyak 4 orang PNS	4	Org	20.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			18	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 10 orang PNS	10	Org	50.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			19	Pelatihan Penerapan Puskesmas Menjadi BLUD dan Mekanisme Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Pelatihan Sistem Keuangan RS sebanyak 210 orang PNS	210	Org	1.050.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			20	Pelatihan Disain dan Implementasi JKN menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Disain dan Implementasi JKN menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk sebanyak 5 orang PNS	5	Org	25.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
	21	Pelatihan Kepemimpinan Kesehatan bagi Kepala Puskesmas (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Kesehatan bagi Kepala Puskesmas sebanyak 21 orang PNS	21	Org	105.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran				
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV					
					Volume	Satuan												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			22	Pelatihan Surveilans Kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Surveilans Kesehatan sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				23	Pelatihan Kesehatan Kerja bagi Petugas Kesehatan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kesehatan Kerja bagi Petugas Kesehatan sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				24	Pelatihan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebanyak 25 orang PNS	25	Org	125.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				25	Pelatihan Pengawasan Pos Market Produk Makanan & Minuman Industri Rumah Tangga (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Pos Market Produk Makanan & Minuman Industri RumahTangga sebanyak 3 orang PNS	3	Org	15.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				26	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 50 orangPNS	50	Org	250.000.000	BPPSDMK/Prov Sumbar/Dinas kesehatan Kab.Pessel	Tenaga Medis	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				b. Urusan Pilihan						2.849.470.000								
				b.1 Bidang Pariwisata				42		1.150.000.000								
						1	Penerapan NSPK Bidang Pariwisata (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya pelatihan NSPK pariwisata untuk 2 orang PNS	4	orang	100.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				2	Pengelolaan daya tarik wisata (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan daya tarik wisata untuk 2 orang PNS	4	orang	100.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				3	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan kawasan strategis pariwisata untuk2 orang PNS	4	orang	100.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		
				4	Pengelolaan destinasi pariwisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan destinasi pariwisata untuk 2 orangPNS	4	orang	100.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM		

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran		
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			5	Pemasaran Pariwisata (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Pariwisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				6	Pelatihan Hotel dan Restoran (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Hotel dan Restoran untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				7	Pelatihan Tata Boga (<i>Food Production</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Boga untuk 1 orang PNS	3	orang	75.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				8	Pelatihan <i>Tour Leader</i> (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tour Wisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				9	Pelatihan Tata Hidang (<i>Food and Beverage Service</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Hidang	3	orang	75.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				10	Pelatihan Kantor Depan (<i>Front Office</i>) (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kantor Depan (front desk) untuk 1 orang PNS	3	orang	75.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				11	Pelatihan Tata Graha (<i>House Keeping</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Tata Graha untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				12	Pelatihan Agen Perjalanan (<i>Travel Agencies</i>) (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Agen Perjalanan untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				13	Pelatihan Kerja Operasional Tur (<i>Tour Operation</i>) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kerja Operasional Tur untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				14	Pelatihan Pemandu Wisata Selam (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Selam untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekrat/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan								% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		15	Kepemanduan Wisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemanduan Wisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			16	Kepemanduan Museum (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemanduan Moseum untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			17	Kepemanduan Ekowisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Kepemanduan Ekowosata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			18	Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Arung Jeram untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			19	Perencanaan Pariwisata Daerah (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Pariwisata Daerah untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
Peningkatan Sumber Daya Manusia			20	Pengembangan Wisata Religi (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Wisata Religi	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			21	Perencanaan Pariwisata Terintegrasi (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan Pariwisata Terintegrasi untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			22	Pelatihan Membangun Kemitraan Pengembangan & Promosi Pariwisata (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Membangun Kemitraan Pengembangan dan Promosi Pariwisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			23	Pelatihan Pola Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pola Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan								% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		24	Pengelolaan SDM Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat.(Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan SDM Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk 1 orang PNS	1	orang	25.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			25	Pelatihan Speaking English (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Speaking English untuk 10 orang PNS	10	orang	100.000.000	Pusbang SDM Parekraf/Prov Sumbar/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			b.2 Bidang Pertanian						685.000.000							
			1	Pelatihan NSPK Bidang Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan NSPK Bidang Pertanian sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			2	Pelatihan Teknis Irigasi (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Irigasi sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		3	Pelatihan Penyuluh Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penyuluh Pertanian sebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			4	Pelatihan Produksi Benih Tanaman (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Produksi Benih Tanaman sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			5	Pelatihan Fasilitator Tanaman Organik (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Fasilitator Tanaman Organik sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			6	Pelatihan Inspektur Tanaman Organik (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Inspektur Tanaman Organik sebanyak 1 orang	1	orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	
			7	Pelatihan Teknologi Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Teknologi Pertanian sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM	

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan								% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV			
					Volume	Satuan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				8	Pelatihan Komoditi Pertanian (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya PelatihanKomoditi Pertanian sebanyak 2 orang	2	orang	10.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				9	Pelatihan Budidaya Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Pertanian sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				10	Pelatihan Agrobisnis (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Agrobisnis sebanyak 5 orang	5	orang	25.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (PP) (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian sebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				12	Pelatihan Teknis Padi bagi Penyuluh Pertanian (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Teknis Padi bagi Penyuluh Pertanian sebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				13	Pelatihan Teknis Jagung bagi Penyuluh Pertanian (Klasikal/ Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan NSPK Bidang Pertanian sebanyak 10 orang	10	orang	50.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				14	Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 25 orang	25	orang	125.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				15	Pelatihan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Usaha Pertanian (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Usaha Pertanian sebanyak 1 orang	1	Orang	5.000.000	BPPSDMPProv Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
				b.3 Bidang Kelautan dan Perikanan			246		1.014.470.000							BKPSDM
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan			1	Penerapan NSPK bidang Kelautan dan Perikanan (Klasikal/Non Klasikal)	Terlaksananya Pelatihan Penerapan NSPK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk 1 orang ASN	1	Org	10.000.000	BPSDMKP/Prov Sumbar/Kab.Pessel	PNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan								% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PNSD Kab.Pesisir Selatan		1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Nasional untuk 3 orang JPT	3	Org	240.000.000	LAN	JPT	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk 5 orang Jabatan Administrator	5	Org	250.000.000	PPSDM/BPSDM	Administrator	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk 30 orang Pengawas	30	Org	800.000.000	PPSDM/BPSDM	Pengawas	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			4	Pelatihan Peningkatan Kepeimpinan Camat	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kepeimpinan Camat untuk 3 orang	3	Org	105.000.000	PPSDM/BPSDM	Camat	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			5	Pelatihan Dasar CPNS	Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS untuk 100 orang	50	Org	900.000.000	PPSDM/BPSDM	CPNS	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			6	Pelatihan Jabatan Fungsional Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Pertanian untuk 10 orang	10	Org	152.000.000	BPPSDMP	JFT Rumpun Pertanian	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			7	Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana untuk 6 orang	6	Org	150.000.000	Pusbindiklatren-Bappenas	JFT Perencana	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			8	Pelatihan Jabatan Fungsional Perikanan dan Kelautan	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Perikanan dan Kelautan untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	BPSDMKP	JFT Rumpun Perikanan dan Kelautan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			9	Pelatihan Jabatan Fungsional Pariwisata	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Pariwisata untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	Pusbang SDM Parekraf	JFT Rumpun Pariwisata	25%	50%	75%	100%	BKPSDM
			10	Pelatihan Jabatan Fungsional Kepegawaian	Terlaksananya Pelatihan Jabatan Fungsional Kepegawaian untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	PusbangASN BKN	JFT Rumpun Kepegawaian	25%	50%	75%	100%	BKPSDM

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			11	Pelatihan Jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Jabatan Fungsional Pendidikan dan Kebudayaan untuk 4 orang	4	Org	100.000.000	Pusdiklat Kemendikbud	JFT Rumpun Pendidikan dan Kebudayaan	25%	50%	75%	100%	BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (BKPSDM)**
Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

K E P U T U S A N
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 013 / BKPSDM-2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun

- 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 106 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.;

- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir
Selatan



TAMSIR, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19670312 198803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 013 /BKPSDM-2023

TANGGAL : 30 Januari 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Terwujudnya Pemerintahan Akuntabel Berkinerja yang dan	1. Nilai RB BKPSDM	B (60)	B (60)	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)
	2. Nilai AKIP BKPSDM	A	A	A	A	A	A
2. Meningkatnya Daya Saing ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	57	57	58	61	66	71
	2. Indeks Merit Sistem	126	184	250	252	254	255
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	80	80	100	100	100	100

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	2. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalin dan Evaluasi	-	-	100%	100%	100%	100%
	3. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
	4. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai			91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	25%	30%	80%	82%	85%	90%
3. Meningkatnya Manajemen sistem Karir ASN berdasarkan Merit system	1. Persentase Merit Sistem Yang Tercapai	32%	46%	63%	63%	64%	64%
4. Meningkatnya Inovasi BKPSDM	1. Jumlah Inovasi BKPSDM	1	1	1	1	1	1

KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2	2	2	2	2	2
	2. Jumlah rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang di susun	4	4	4	4	4	4
	3. Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2	2
2. Meningkatnya Pelaksanaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan	1. Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2	2
3. Meningkatnya Inovasi Bidang BKPSDM	1. Jumlah Inovasi Bidang BKPSDM	1	1	1	1	1	1
4. Meningkatnya Kualitas layanan Internal BKPSDM	1. Jumlah Pemenuhan ASN BKPSDM yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja	91	91	91	91	91	91
	2. Jumlah ASN BKPSDM Yang Hadir Tepat Waktu	45	45	45	45	45	45
	3. Jumlah Pengurusan KGB ASN BKPSDM Yang Tepat Waktu	20	20	20	20	20	20
	4. Jumlah Sarana dan Prasarana	20	20	20	55	29	24
	5. Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	2	2	2	10	10	10
	6. Jumlah dokumen publik dan dipublish	10	10	10	10	10	10
5. Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	1. Jumlah pengembangan Modul pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat	1400	1400	1400	1100	1100	1000
	3. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun	345	313	314	346	381	384
	4. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karpeg	225	300				
	5. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karis/Karsu	225	300	250	150	150	150
	6. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat tugas belajar	117	60	50	50	50	50
	7. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah dalam kabupaten	40	54	50	48	46	45

	8. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah keluar kabupaten	40	54	50	48	46	45
	9. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah masuk kabupaten	40	54	50	48	46	45
	10. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pembekalan Pranikah	50	50	55	60	65	70
	11. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Proses Perceraian	30	30	25	20	18	17
6. Terlaksananya Penyusunan Dan Pengadaan Formasi ASN Berdasarkan Anjab dan ABK	1. Jumlah Formasi Pegawai yang dibutuhkan di Daerah Berdasarkan Anjab dan ABK	345	313	314	346	381	384
	2. Jumlah Pelamar Yang Lulus CPNS dan PPPK	654	205	1269	2900	250	200
	3. Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	75	75	77	78	83	85
	4. Persentase Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	25	25	30	35	40	50
	5. Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	1	5	10	25	50	75
7. Meningkatnya Pengembangan Karir ASN	1. Jumlah Peserta yang Lulus Administrasi dalam Pengisian JPT	15		15		40	40
	2. Jumlah PNS yang telah mengikuti pemetaan potensi			40	45	47	50
	3. Jumlah PNS yang melakukan ujian dinas		200	200	100	100	100
	4. Jumlah Tugas Belajar yang diterbitkan	61	55	60	65	68	70
	5. Jumlah PNS yang dipromosi	200	200	40	45	46	50
8. Meningkatnya Kompetensi ASN	1. Jumlah PNS yang Diklat PKN, PKA, PKP	10	10	6	30	30	30
	2. Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional (ujian kompetensi, kenaikan jenjang)		3	34	40	60	80
	3. Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis	10	10	200	240	280	320
	4. Jumlah PNS yang Mengikuti Latsar	143	29			250	200
	5. Jumlah Pembekalan Dasar PPPK			446	1269	2900	100

	6. Jumlah Bimbingan Teknis, Coaching clinic, Sosialisasi		2	4	6	10	15
9. Meningkatnya Manajemen Kinerja	1. Jumlah PNS yang telah dilakukan penilaian kinerja	6000	6000	5700	5400	5100	4800
	2. Jumlah PNS Yang dilakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi	6000	6000	5700	5400	5100	4800
	3. Jumlah Penurunan Pelanggaran Disiplin	17	9	8	7	7	6
	4. Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan		400	200	100	100	100

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia an tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formulasi	: Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BKPSDM.

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
 Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
 Penanggung jawab : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Indeks Profesionalitas ASN

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Definisi Operasional : Merupakan Hasil IP ASN didapat dari Aplikasi Hasil BKN
 Formulasi :

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA DAN PELAKSANAAN
 PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS
 APARATUR SIPIL NEGARA

RUMUS PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator



Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

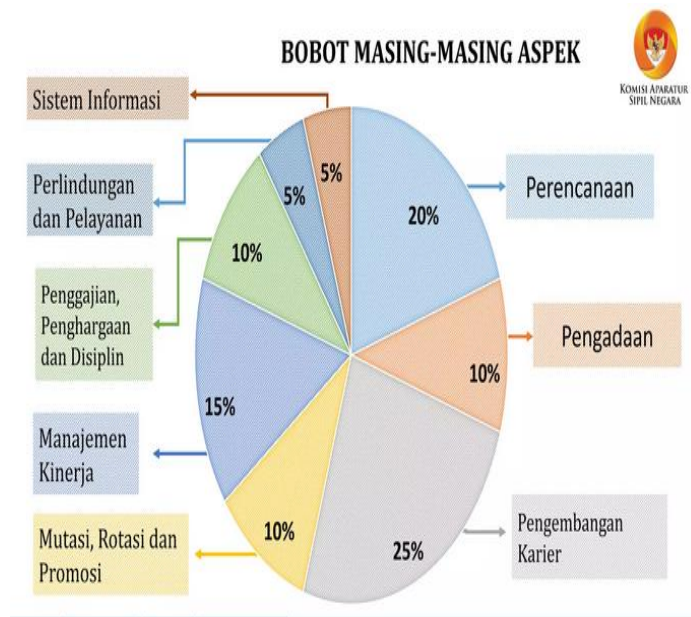
Penanggung jawab : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Indeks Merit System

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan Hasil diambil dari aplikasi sipinter (KASN)

Formulasi :



NILAI DAN INDEKS SISTEM MERIT

NO	KATEGORI	NILAI	INDEKS	SEBUTAN
1	IV	325 - 400	0.81 - 1	Sangat Baik
2	III	250 - 324	0.61 - 0.8	Baik
3	II	175 - 249	0.41 - 0.6	Kurang
4	I	100 - 174	0.2 - 0.4	Buruk

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Penanggung jawab : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggung jawab : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

6. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Bidang program dan perencanaan serta keuangan.

Penanggung jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
Formulasi	:	Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
Sumber data	:	Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat.
Penanggung jawab	:	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan seluruh pejabat structural maupun fungsional di sekretariat.

8. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah bidang}}$
Sumber data	:	Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
Penanggung jawab	:	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Seluruh Kepala Bidang.

9. Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	:	Dilakukan Tiap Triwulan, Pembentukan Tim, Kuisisioner disebar melalui link / survei internet, Penetapan Jumlah Responden, Pengukuran Hasil Survei, Analisa Hasil Survei
Sumber data	:	ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, PPI ASN, dan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN

10. Persentase Merit System Yang Tercapai

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Persentase dari nilai indeks merit system

Formulasi :

NILAI DAN INDEKS SISTEM MERIT

NO	KATEGORI	NILAI	INDEKS	SEBUTAN
1	IV	325 - 400	0.81 - 1	Sangat Baik
2	III	250 - 324	0.61 - 0.8	Baik
3	II	175 - 249	0.41 - 0.6	Kurang
4	I	100 - 174	0.2 - 0.4	Buruk

$$\frac{\text{Indeks Nilai Merit System yang didapat}}{\text{Indeks Nilai Merit System yang maksimal}} \times 100\%$$

Sumber data : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penanggung jawab : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, PPI ASN, dan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN

11. Jumlah Inovasi BKPSDM

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
Definisi Operasional : Merupakan inovasi yang disusun oleh seluruh eselon III di BKPSDM dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi BKPSDM yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya.

Formulasi : Jumlah Inovasi setiap eselon III

Sumber data : Sekretariat dan Bidang di BKPSDM.

Penanggung jawab : Sekretaris dan Kepala Bidang di BKPSDM.

12. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui kotak saran yang telah disediakan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/saran}} \times 100\%$$

Sumber data : Sosial media, Media cetak, Kotak saran

Penanggung jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPSDM.

13. Persentase dokumen publik dan dipublish

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Merupakan dokumen publik yang di publish sesuai ketentuan PPID.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$			
Sumber data	:	BKPSDM	
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepagawaian BKPSDM	

14. Jumlah Pemenuhan ASN BKPSDM yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Jumlah Pemenuhan ASN BKPSDM Yang Sesuai dengan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Formulasi	:	Jumlah Pemenuhan ASN BKPSDM Yang Sesuai dengan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Sumber data	:	BKPSDM
Penanggung jawab	:	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian BKPSDM.

15. Jumlah ASN BKPSDM Yang Hadir Tepat Waktu

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Jumlah ASN BKPSDM Yang Hadir Tepat Waktu
Formulasi	:	Jumlah Jumlah ASN BKPSDM Yang Hadir Tepat Waktu
Sumber data	:	BKPSDM
Penanggung jawab	:	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian BKPSDM.

16. Jumlah Pengurusan KGB ASN BKPSDM Yang Tepat Waktu

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Jumlah Pengurusan KGB ASN BKPSDM Yang Tepat Waktu pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.
Formulasi	:	Jumlah Pengurusan KGB ASN BKPSDM Yang Tepat Waktu
Sumber data	:	BKPSDM
Penanggung jawab	:	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian BKPSDM.

17. Jumlah Sarana dan Prasarana

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran

Formulasi : Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran
Sumber data : BKPSDM
Penanggung jawab : Kepala sub bagian umum dan kepegawaian BKPSDM.

18. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian program dan perencanaan dan keuangan. Dokumen yang disusun oleh bagian program dan perencanaan sebanyak 2 dokumen
Formulasi : Jumlah Dokumen
Sumber data : BKPSDM
Penanggung jawab : Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BKPSDM

19. Jumlah rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian program dan perencanaan dan keuangan berupa RKA dan DPA. Dokumen yang disusun oleh bagian program dan perencanaan sebanyak 4 dokumen
Formulasi : Jumlah Dokumen
Sumber data : BKPSDM
Penanggung jawab : Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BKPSDM

20. Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian evaluasi kinerja. Dokumen yang disusun oleh bagian program dan perencanaan sebanyak 2 dokumen
Formulasi : Jumlah Dokumen
Sumber data : BKPSDM
Penanggung jawab : Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BKPSDM

21. Jumlah pengembangan Modul pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Dokumen pengembangan Modul pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian
Formulasi : Jumlah pengembangan Modul pada Aplikasi

Sumber data : Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian
BKPSDM
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

22. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Kenaikkan Pangkat Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Mutasi dan Promosi ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

23. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Pensiun Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pensiun
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

24. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karpeg

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Karpeg Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karpeg
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

25. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karis/Karsu

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Karis/Karsu Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karis/Karsu
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

26. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat tugas belajar

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Tugas Belajar Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat

Tugas Belajar
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

27. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah dalam kabupaten

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Pindah Dalam Kabupaten Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pindah Dalam Kabupaten Yang Sesuai dengan persyaratan
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Mutasi dan Promosi ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

28. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah keluar kabupaten

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Pindah Keluar Kabupaten Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pindah Keluar Kabupaten Yang Sesuai dengan persyaratan
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Mutasi dan Promosi ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

29. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah masuk kabupaten

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Pindah Masuk Kabupaten Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pindah Masuk Kabupaten Yang Sesuai dengan persyaratan
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Mutasi dan Promosi ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

30. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pembekalan Pranikah

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Pembekalan Pranikah Yang Sesuai dengan persyaratan
Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pembekalan Pranikah Yang Sesuai dengan persyaratan

Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

31. Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Proses Perceraian

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bahan Proses Perceraian Yang Sesuai dengan persyaratan

Formulasi : Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Proses Perceraian Yang Sesuai dengan persyaratan

Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

32. Jumlah Formasi Pegawai yang dibutuhkan di Daerah Berdasarkan Anjab dan ABK

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah Formasi Pegawai yang dibutuhkan di Daerah Berdasarkan Anjab dan ABK

Formulasi : Jumlah Formasi Pegawai yang dibutuhkan di Daerah Berdasarkan Anjab dan ABK

Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

33. Jumlah Pelamar Yang Lulus CPNS dan PPPK

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah Pelamar Yang Lulus CPNS dan PPPK

Formulasi : Jumlah Pelamar Yang Lulus CPNS dan PPPK

Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

34. Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci yang mana Persentase Jumlah Pegawai Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) terhadap Jumlah Pegawai Pendidikan dibawah SMA (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Formulasi :

Jumlah Pegawai Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) $\times 100\%$
--

Jumlah Pegawai Pendidikan dibawah SMA (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

35. Persentase Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci yang mana Persentase Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) terhadap Jumlah Pegawai semua (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Jumlah Pegawai semua (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$$

Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum dan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

36. Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci yang mana Persentase Jumlah Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) terhadap Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$$

Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum dan Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

37. Jumlah Peserta yang Lulus Administrasi dalam Pengisian JPT

Level dalam Renstra	: Kinerja operasional
Definisi Operasional	: Jumlah Peserta yang Lulus Administrasi dalam Pengisian JPT
Formulasi	: Jumlah Peserta yang Lulus Administrasi dalam Pengisian JPT
Sumber data	: ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Bidang Mutasi dan Promosi dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

38. Jumlah PNS yang telah mengikuti pemetaan potensi

Level dalam Renstra	: Kinerja operasional
Definisi Operasional	: Jumlah PNS yang telah mengikuti pemetaan potensi
Formulasi	: Jumlah PNS yang telah mengikuti pemetaan potensi
Sumber data	: ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

39. Jumlah PNS yang melakukan ujian dinas

Level dalam Renstra	: Kinerja operasional
Definisi Operasional	: Jumlah PNS yang melakukan ujian dinas
Formulasi	: Jumlah PNS yang melakukan ujian dinas
Sumber data	: ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Bidang Mutasi dan Promosi dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

40. Jumlah Tugas Belajar yang diterbitkan

Level dalam Renstra	: Kinerja operasional
Definisi Operasional	: Jumlah Tugas Belajar Yang Diterbitkan
Formulasi	: Jumlah Tugas Belajar Yang Diterbitkan
Sumber data	: ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

41. Jumlah PNS yang dipromosi

Level dalam Renstra	: Kinerja operasional
Definisi Operasional	: Jumlah PNS Yang dipromosi
Formulasi	: Jumlah PNS Yang dipromosi
Sumber data	: ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Bidang Mutasi dan Promosi dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

42. Jumlah PNS yang Diklat PKN, PKA, PKP

Level dalam Renstra	:	Kinerja operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah PNS yang Diklat PKN, PKA, PKP
Formulasi	:	Jumlah PNS yang Diklat PKN, PKA, PKP
Sumber data	:	ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

43. Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional (ujian kompetensi, kenaikan jenjang)

Level dalam Renstra	:	Kinerja operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional (ujian kompetensi, kenaikan jenjang)
Formulasi	:	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional (ujian kompetensi, kenaikan jenjang)
Sumber data	:	ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

44. Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis

Level dalam Renstra	:	Kinerja operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis
Formulasi	:	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis
Sumber data	:	ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

45. Jumlah PNS yang Mengikuti Latsar

Level dalam Renstra	:	Kinerja operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah PNS yang Mengikuti Latsar
Formulasi	:	Jumlah PNS yang Mengikuti Latsar
Sumber data	:	ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab	:	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

46. Jumlah Pembekalan Dasar PPPK

Level dalam Renstra	:	Kinerja operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah Pembekalan Dasar PPPK
Formulasi	:	Jumlah Pembekalan Dasar PPPK
Sumber data	:	ASN Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung jawab : Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

47. Jumlah Bimbingan Teknis, Coaching clinic, Sosialisasi

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah Bimbingan Teknis, Coaching clinic, Sosialisasi
Formulasi : Jumlah Bimbingan Teknis, Coaching clinic, Sosialisasi
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

48. Jumlah PNS yang telah dilakukan penilaian kinerja

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah PNS yang telah dilakukan penilaian kinerja
Formulasi : Jumlah PNS yang telah dilakukan penilaian kinerja
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

49. Jumlah PNS Yang dilakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah PNS yang telah dilakukan penilaian kinerja
Formulasi : Jumlah PNS yang telah dilakukan penilaian kinerja
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang PPI ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

50. Jumlah Penurunan Pelanggaran Disiplin

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah PNS Pelanggaran Disiplin
Formulasi : Jumlah PNS Pelanggaran Disiplin
Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

51. Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan

Level dalam Renstra : Kinerja operasional
Definisi Operasional : Jumlah PNS Mendapat Penghargaan
Formulasi : Jumlah PNS Mendapat Penghargaan

Sumber data : ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Penanggung jawab : Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

52. Jumlah Inovasi Bidang BKPSDM

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Pengentrian inovasi pada aplikasi IGA dilakukan dengan mengentrikan komponen-komponen yang terdapat pada aplikasi tersebut. Komponen tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kemendagri sehingga dapat dilakukan penilaian untuk mendapatkan indeks inovasi daerah. Dimana Inovasi Bidang ini yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum pada tiap - tiap bidangnya

Formulasi : Jumlah Inovasi Bidang
Sumber data : ASN BKPSDM
Penanggung jawab : Sekretariat, Bidang BKPSDM dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



TAMSIR, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 198803 1 003

TARGET SASARAN INDIKATOR BKPSDM TAHUN 2021-2026

SASARAN / INDIKATOR IPT PRATAMA		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja							
1	Nilai RB BKPSDM	B (60)	B (60)	B (65)	B (66)	B (67)	B (68)
2	Nilai AKIP BKPSDM	A	A	A	A	A	A
Meningkatnya Daya Saing ASN							
1	Indeks Profesionalitas ASN	57	57	58	61	66	71
2	Indeks Merit Sistem	126	184	250	252	254	255
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah							
1	Nilai Kematangan Inovasi BKPSDM	80	80	100	100	100	100
SASARAN / INDIKATOR ADMINISTRATOR							
Meningkatnya Inovasi BKPSDM							
1	Jumlah Inovasi BKPSDM	1	1	1	1	1	1
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian							
1	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	25%	30%	80%	82%	85%	90%
Meningkatnya Manajemen sistem karir ASN berdasarkan Merit system							
1	Persentase Merit Sistem Yang Tercapai	32%	46%	63%	63%	64%	64%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM							
1	Persentase Kelengkapan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100	100	100	100	100	100
2	Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
3	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	91-100	91-100	91-100	91-100	91-100	91-100
SASARAN / INDIKATOR PENGAWAS / OPERATOR							
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian							
1	Jumlah pengembangan Modul pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat	1400	1400	1400	1100	1100	1000
3	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Penunjang	345	313	314	346	381	384
4	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karpeg	225	300				
5	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Karis/Karsu	225	300	250	150	150	150
6	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat tugas belajar	117	60	50	50	50	50
7	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah dalam kabupaten	40	54	50	48	46	45
8	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah keluar kabupaten	40	54	50	48	46	45
9	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat pindah masuk kabupaten	40	54	50	48	46	45
10	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Pembekalan Pratikah	50	50	55	60	65	70
11	Jumlah Berkas PNS yang Memenuhi Syarat Proses Penceraian	30	30	25	20	18	17
Meningkatnya Kualitas layanan Internal BKPSDM							
1	Jumlah Pemenuhan ASN BKPSDM yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja	91	91	91	91	91	91
2	Jumlah ASN BKPSDM Yang Hadir Tepat Waktu	45	45	45	45	45	45
3	Jumlah Pengurusan KGB ASN BKPSDM Yang Tepat Waktu	20	20	20	20	20	20
4	Jumlah Sarana dan Prasarana	20	20	20	55	29	24

5	Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	2	2	2	10	10	10	10
6	Jumlah dokumen publik dan dipublish	10	10	10	10	10	10	10
Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengadaan Formasi ASN Berdasarkan Anjab dan ABK								
1	Jumlah Formasi Pegawai yang dibutuhkan di Daerah Berdasarkan Anjab dan ABK	345	313	314	346	381	384	
2	Jumlah Pelamar Yang Lulus CPNS dan PPPK	654	205	1269	2900	250	200	
3	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	75	75	77	78	83	85	
4	Persentase Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	25	25	30	35	40	50	
5	Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	1	5	10	25	50	75	
Meningkatnya Pengembangan Karir ASN								
1	Jumlah Peserta yang Lulus Administrasi dalam Penilaian JPT	15		15		40		
2	Jumlah PNS yang telah mengikuti pemetaan potensi			40	45	47	50	
3	Jumlah PNS yang melakukan ujian dinas		200	200	100	100	100	
4	Jumlah Tugas Belajar yang diterbitkan	61	55	60	65	68	70	
5	Jumlah PNS yang dipromosi	200	200	40	45	46	50	
Meningkatnya Kompetensi ASN								
1	Jumlah PNS yang Diklat PKN, PKA, PKP	10	10	6	30	30	30	
2	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional (ujian kompetensi, kenaikan jenjang)		3	34	40	60	80	
3	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis	10	10	200	240	280	320	
4	Jumlah PNS yang Mengikuti Latsar	143	29			250	200	
5	Jumlah Pembekalan Dasar PPPK			446	1269	2900	100	
6	Jumlah Bimbingan Teknis, Coaching clinic, Sosialisasi		2	4	6	10	15	
Meningkatnya Manajemen Kinerja								
1	Jumlah PNS yang telah dilakukan penilaian kinerja	6000	6000	5700	5400	5100	4800	
2	Jumlah PNS Yang dilakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi	6000	6000	5700	5400	5100	4800	
3	Jumlah Penurunan Pelanggaran Disiplin	17	9	8	7	7	6	
4	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan		400	200	100	100	100	
Meningkatnya Inovasi Bidang BKPSDM								
1	Jumlah Inovasi Bidang BKPSDM	1	1	1	1	1	1	
Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran								
1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2	2	2	2	2	2	
2	Jumlah rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang di susun	4	4	4	4	4	4	
3	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2	2	
Meningkatnya Pelaksanaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan								
1	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2	2	

